

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung
- Ahmad Ali, 2012, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Intepretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anthon F.Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, Indonesia
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.
- G.W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan , Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.

Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

Heri Tahir, 2012, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Indonesia

Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Elia W. Mastoko, 2011. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)*, Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya.

M. Hamim Soeriaamidjaja, 1984, *Pedoman Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara)*, Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia, Bogor

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

O.Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, Indonesia

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, 1990, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Karya Nusantara, Bandung

S.M.Amin, 1967, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Peradin, Jakarta, Indonesia

Samsuardi, *Materi Pelajaran INAFIS imum (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System)*,

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI, Jakarta, Indonesia

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Indonesia

-----, 2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Persada, Jakarta, Indonesia

Subekti, 1994, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Liberty, Yogyakarta

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Indonesia di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Indonesia

Yan Pramdya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, Indonesia

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 951.

## B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 - tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHP.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/I/2005 tentang Perubahan Skep No. Pol: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : JUKLAK /04/II/1982 tentang Penanganan tempat kejadian perkara